**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG NOMOR 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg.**

1. **Gambaran Pengadilan Agama Palembang**

Peradilan berasal dari bahasa Arab yaitu *adil* yang sudah diserap ke dalam Indonesia. Artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Sedangkan Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membentuknya.[[1]](#footnote-2)

Menurut Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama ialah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.[[2]](#footnote-3) Kata peradilan sama artinya dalam istilah *fiqh,* yaitu *qadha* dan *aqdhiyah* sedangkan pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan. Oleh karena itu, peradilan agama sering disebut pula *mahkamah syar’iyah,* artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara’.[[3]](#footnote-4)

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat badan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama sebagai peradilan khusus dimana meliputi perkara-perkara perdata tertentu dan golongan rakyat yang beragama Islam.[[4]](#footnote-5)

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palembang[[5]](#footnote-6)
   1. Dari Zaman Kesultanan Palembang

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi, jauh ke dalam segera sesudah lekuk menentang arus yang mengilhami muara bernama Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.

Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh *De Roo De La Faille*, anggota *Raad Van Indie* (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, bahwa dalam tradisi kesultanan Palembang dikenal tentang “empat mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi sultan, seperti halnya “catur menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Pepatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Pepatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Pepatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang sultan yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah menjabat *Komisaris Raad Van Indie*, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan *Surambi* di Solo dan pemisahan hukum *dirgama* dengan hukum Agama di Cirebon.

Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

* 1. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan mulai tahun 1790. Saat Sultan Mahmud Badaruddin II naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Mahmud Badaruddi l, Inggris mulai mendekati Palembang yang pada saat itu Sultan Mahmud Badaruddin II bertahta ia mengizinkan Inggris berdagang di Palembang dan mendirikan kantor dagang disana.

Pada awalnya adalah untuk berdagang dan menjalin hubungan kerja sama, karena timbul persaingan antara Belanda dan Inggris, maka Inggris melalui Raffles berusaha membujuk Sultan Mahmud Badaruddin II agar mengusir Belanda dari Palembang, namun Sultan Mahmud Badaruddin II menolak permintaan Raffles karena tidak ingin terlibat dalam pertikaian Inggris dan Belanda.

Hingga pada tanggal 14 september 1811 terjadi pembantaian di loji sungai alur yang mengalahkan pihak Belanda, namun Belanda beranggapan Inggris sengaja melakukannya agar kesultanan Palembang mengusir Belanda dari tanah Palembang. Karena merasa terpojok Inggris dibawah pimpinan Raffles mengadakan perundingan dengan Sultan Mahmud Badaruddin II dan berharap mendapatkan jatah pulau Bangka yang saat itu masuk wilayah kesultanan Palembang dan merupakan penghasil timah yang diperebutkan antara Belanda dan Inggris, namun permintaan Inggris jelas ditolak oleh Sultan Mahmud Badaruddin II sehingga Inggris mengirim expedisi militer pada 12 maret 1812 dibawah pimpinan Gillespie ke Palembang dan memerangi Palembang dengan alasan menghukum Sultan Mahmud Badaruddin II atas penolakannya menyerahkan wilayah pulau Bangka. Dalam sebuah pertempuran singkat Palembang berhasil diduduki oleh Inggris dan Sultan Mahmud Badaruddin II menyingkir ke Muara Rawas di hulu sungai musi.[[6]](#footnote-7)

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.

* 1. Perubahan Nata Agama menjadi *Raad* Agama

Tidak dapat dipastikan secara historis kapan sebenarnya terjadi perubahan istilah dan wewenang dalam mengadili perkara-perkara dibidang agama dari Nata Agama yang dikepalai oleh seorang Pangeran Penghulu kepada *Raad* Agama yang diketuai oleh *Hoofd* Penghulu. Sebab walaupun dalam “Memorandum Tentang Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia” disebut bahwa dasar dari Pengadilan Agama di beberapa daerah di Sumatera selain Sumatera Timur, Aceh, dan Riau adalah pasal 12 *Staatsblad* 1932 No.80; Pada kenyataannya, di Palembang pada tahun 1906 telah ada produk hukum *Raad* Agama berbentuk Penetapan Hibah; Penetapan nomor : 7/1906 tertanggal 28 April 1906 dengan formasi majelis yang dipimpin oleh seorang *Hoofd* Penghulu.

Dengan bergantinya dari Nata Agama menjadi *Raad* Agama, berarti lembaga tersebut berada di bawah Peradilan Umum yang disebut *Landraad*, dan pengangkatan *Hoofd* Penghulu sendiri sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial Belanda.

Sampai tahun 1918 *Hoofd* Penghulu pada *Raad* Agama Palembang adalah Sayid Abdurrahman, yang kemudian diganti oleh Kiagus Muhammad Yusuf tahun 1919. Pada tanggal 19 Pebruari 1922, ditunjuk sebagai *Hoofd* Penghulu Kiagus Haji Nangtoyib bin Kiagus Haji Muhammad Azhari, yang bertugas sampai dengan tanggal 14 Pebruari 1942, yaitu sampai awal masa pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang ini, hampir tak ada perubahan yang berarti dalam bidang Tata Hukum di Indonesia, termasuk susunan kekuasaan peradilan, kecuali mengenai tata pemerintahan dan pergantian nama-nama badan peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang, nama *Raad* Agama yang oleh Belanda sering disebut *Penghulugerecht* diubah menjadi *Sooryoo Hoin.*

Di Palembang sampai pada masa proklamasi kemerdekaan, penghulu pada *Tihoo Hoin* atau *Landraad* tetap dipegang oleh Kiagus Haji Nangtoyib dengan tugas-tugas yang sama dengan tugas-tugas *Sooryoo Hoin.*

* 1. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena setelah pecahnya **clash II** dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar`iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syar`iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementrian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementrian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari *Raad* Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifir kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementrian Kehakiman.

Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.

* 1. Perkembangan sesudah PP Nomor 45 tahun 1957

Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar`iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Jambi.

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang.

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur`aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung “Milik Sendiri” yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri.  pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahterimakan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk.

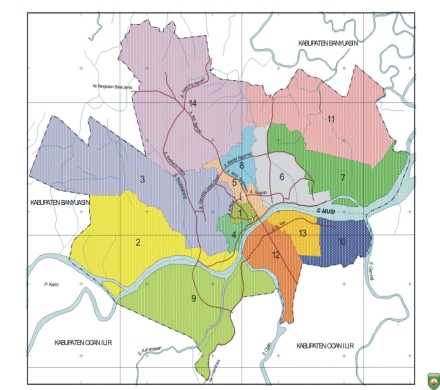
Pada periode 1990 s.d. 1995, Ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H.  Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H.

Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002.  Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang.

Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H.  Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009.  Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat. SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas IB. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pada tanggal 4 Januari 2012 telah dilakukan pengambilan sumpah jabatan ketua Pengadilan Agama Palembang H. Helminizami, S.H., M.H. oleh Drs. H. Muchsin Asyrof, S.H.,M.H. Beliau adalah ketua Pengadilan Agama Balik Papan Propinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 26 Agustus 2013 beliau dipromosi menjadi Hakim Tinggi Makassar yang kemudian pimpinan Pengadilan Agama Palembang digantikan oleh Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. Yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Bapak Drs. H. Yasmidi, S.H., pada tanggal 27 Agustus 2013 bertempat di Hotel Peninsula Palembang. Beliau sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Makassar sebagai Wakil Ketua.

1. Lokasi atau Dena Pengadilan Agama Palembang
   1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang



1. Struktur organisasi beserta nama-nama Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Palembang

Sebagai gambaran, berikut bagan susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang :



Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tahun 2015.

1. Tugas Pokok Masing-Masing Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang (*Job Description*).[[7]](#footnote-8)
   1. Ketua Pengadilan Agama bertugas:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

* 1. Wakil Ketua bertugas:

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

* 1. Hakim bertugas:

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

* 1. Panitera/Sekretaris bertugas:

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

* 1. Wakil Panitera bertugas:

Membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1 meja II meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

* 1. Wakil Sekretaris bertugas:

Mewakili sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di kesekretariatan bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggugjawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada panitera /sekretaris.

* 1. Panitera Muda Hukum bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

* 1. Panitera Muda Gugatan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

* 1. Panitera Muda Permohonan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

* 1. Kepala Sub Bagian Umum bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada sub bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

* 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada sub bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

* 1. Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada sub bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

* 1. Panitera Pengganti bertugas:

Mendampingi dan membatu majelis hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui Wakil Panitera serat bertanggung jawab kepada Panitera /sekretaris.

* 1. Jurusita Dan Jurusita Pengganti bertugas:

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang

Rencana strategis Pengadilan Agama Palembang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Palembang yang selaras dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palembang. Visi Pengadilan Agama Palembang mengacu pada visi Mahkamah Agung, yaitu “Mewujudkan Pengadilan Agama Palembang yang agung”**.**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Palembang menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Palembang adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

Misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan.[[8]](#footnote-9)
5. Jumlah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tahun 2012-2015[[9]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Perkara** | **Jumlah Perkara Per Tahun** | | | | **Total Perkara Tahun 2012-2015** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | 1. Perkawinan | - | - | - | - | - |
| 2 | Izin Poligami | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - |
| 4 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | - | - | - | - | - |
| 5 | Pembatalan Perkawinan | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Kelalaian atas Kewajiban suami / Isteri | - | - | - | - | - |
| 7 | Cerai Talak | 346 | 374 | 379 | 361 | 1460 |
| 8 | Cerai Gugat | 1169 | 1080 | 1222 | 1285 | 4756 |
| 9 | Harta Bersama | 7 | 6 | 14 | 3 | 30 |
| 10 | Penguasaan Anak/Hadhonah | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| 11 | Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak Mampu | - | - | - | - | - |
| 12 | Hak-hak bekas Isteri / Kewajiban  bekas Suami | - | - | - | - | - |
| 13 | Pengesahan Anak | 2 | - | - | - | 2 |
| 14 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | - | - | - | - | - |
| 15 | Perwalian | 5 | 4 | 4 | 8 | 21 |
| 16 | Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - | - |
| 17 | Pencabutan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan | - | - | - | - | - |
| 18 | Ganti Rugi Terhadap Wali | - | - | - | - | - |
| 19 | Asal Usul Anak | - | - | - | - | - |
| 20 | Penolakan Kawin Campur | - | - | - | - | - |
| 21 | Isbat Nikah | 50 | 139 | 53 | 100 | 342 |
| 22 | Izin Kawin | - | - | - | - | - |
| 23 | Dispensasi Kawin | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 24 | Wali Adhol | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 25 | 1. Kewarisan | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 |
| 26 | Permohonan Waris | 40 | 39 | 17 | 20 | 116 |
| 27 | 1. Wasiat | - | - | - | - | - |
| 28 | 1. Hibah | - | - | - | - | - |
| 29 | 1. Wakaf | - | - | - | - | - |
| 30 | 1. Shodaqoh | - | - | - | - | - |
| 31 | 1. Lain-lin | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| **Jumlah** | | **1636** | **1672** | **1707** | **1793** | **6808** |

Dengan melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Palembang sejauh empat tahun terakhir ini didominasi oleh perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat), yaitu jumlah perkara tahun 2012 = 92%, perkara tahun 2013 = 86%, perkara tahun 2014 = 93% dan perkara tahun 2015 = 91%.

Pada level kedua ialah isbat nikah, yaitu jumlah perkara tahun 2012 = 3%, perkara tahun 2013 = 8%, perkara tahun 2014 = 3% dan perkara tahun 2015 = 5%. Sedangkan pada level ketiga mengenai kewarisan, salah satunya adalah kasus yang menyangkut objek kajian penulis. Perinciannya, yaitu tahun 2012 = 2%, perkara tahun 2013 = 2%, perkara tahun 2014 = 1% dan perkara tahun 2015 = 1%.

1. **Deskripsi Kasus Nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg.**

Fakta keluarga Kms. Hamid bin Kms. Yusuf, bahwa semasa hidup almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf telah menikah dengan 4 (empat) orang wanita, dimana dari keempat wanita tersebut tidaklah pernah bersama-sama antara istri pertama dengan istri kedua begitupun istri kedua tidak pernah bersama dengan istri Kms. Hamid bin Kms. Yusuf yang ketiga dan seterusnya. Hal ini dikarenakan almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf pada saat menikah dengan istrinya yang kedua, ketiga ataupun keempat adanya suatu faktor yaitu kematian.

Kms. Hamid bin Kms. Yusuf menikah dengan Murni dan mempunyai 2 (dua) orang, suatu ketika Murni meninggal. Setelah Murni meninggal Kms. Hamid bin Kms. Yusuf kembali menikah untuk kedua kalinya dengan Lela dan mempunyai anak 2 (dua) anak serta suatu ketika Lela pun menyusul almarhumah Murni meninggal dunia. Singkat cerita Kms. Hamid bin Kms. Yusuf menikah kembali untuk ketiga kalinya dengan Solha binti Johar/penggugat I, dari pernikahannya dihasilkan 3 (tiga) orang anak, suatu ketika Solha binti Johar dicerai oleh Kms. Hamid bin Kms. Yusuf dan tidak pernah dirujuk sampai habis masa iddahnya.

Setelah Solha binti Johar/penggugat I diceraikan, Kms. Hamid bin Kms. Yusuf menikah lagi untuk terakhir kalinya yaitu dengan Khodijah binti A. Hamid/tergugat I. Selama Kms. Hamid bin Kms. Yusuf hidup hanya mempunyai harta sebidang tanah dan rumah di atas dan sekarang menjadi harta peninggalan yang ditempati oleh Khodijah dan anak-anaknya.

Duduk perkaranya terhadap kasus nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg,[[10]](#footnote-11) ialah sebagai berikut:

Solha adalah istri ke 3 (tiga) dari almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf, yang menggugat dan menjadi pihak penggugat ke satu untuk menggugat istri ke empat almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf atas nama Khodijah bin A. Hamid, yaitu sebagai pihak tergugat ke satu sebagai pihak yang menguasai harta peninggalan dari almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf, adapun harta peninggalan tersebut ialah sebidang tanah dengan luas 59 M2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen yang berlokasi di Jln. KH. Azhari nomor 11 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Bahwa almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf meninggalkan 4 (empat) orang istri yaitu almarhumah Murni, almarhumah Lela, Solha (penggugat I) dan Khodijah (tergugat I). Dari keempat istri almarhum Kms. Hamid tersebut semuanya mempunyai keturunan yang berjumlah 11 (sebelas) orang anak.

Perkara gugat waris timbul setelah Kms. Hamid bin Kms. Yusuf meninggal dunia yaitu pada tahun 2011. Setelah lebih kurang 1 (satu) tahun wafatnya Kms. Hamid bin Kms. Yusuf harta peninggalannya belum pernah dibagikan atau diberikan kepada ahli waris sebagai harta waris maupun harta gono gini dari almarhum Kms. Hamid. Harta warisan sebagaimana disebutkan di atas sampai almarhum Kms. Hamid meninggal dunia masih dalam keadaan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak manapun.

Adapun yang menjadi para pihak terhadap perkara gugat waris itu sendiri ialah kedua istri almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf dan semua anak dari keempat istri almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf yang turut serta menjadi pihak penggugat dan tergugat dengan rincian yaitu sebagai pihak penggugat I ialah istri almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf ke 3 (tiga) atas nama Solha binti Johar sedangkan sebagai pihak tergugat I adalah istri almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf ke 4 (empat) atas nama Khodijah binti A. Hamid, 2 (dua) orang anak dari almarhum Murni sebagai penggugat 5 (lima) atas nama Kms. Heri bin Kms. Hamid dan penggugat 6 (enam) atas nama Nyimas Ira binti Kms. Hamid, 2 (dua) orang anak dari almarhum Lela sebagai Penggugat 7 (tujuh) atas nama Kms. Deni bin Kms. Hamid dan penggugat 8 (delapan) atas nama Nyimas Dina binti Kms. Hamid.

Selanjutnya 3 (tiga) orang anak dari penggugat I untuk turut serta sebagai penggugat yaitu penggugat ke 2 (dua) atas nama Nyimas Yuli Fitrianti binti Kms. Hamid, penggugat ke 3 (tiga) atas nama Nyimas Ana Kopen binti Kms. Hamid dan penggugat ke 4 (empat) atas nama Nyimas Husnul Hotimah binti Kms. Hamid serta 4 (empat) orang anak dari pihak tergugat I yaitu turut serta sebagai pihak tergugat ke 2 (dua) atas nama Kms Muharam Fisabilillah bin Kms. Hamid, tergugat ke 3 (tiga) atas nama Nyimas Ayu Wandira binti Kms. Hamid, tergugat ke 4 (empat) atas nama Kms Yunus bin Kms Hamid dan tergugat ke 5 (lima) atas nama Nyimas Saraswati binti Kms. Hamid, kesemuanya tersebut dalam keadaan hidup serta beragama Islam.

Setelah beberapa tahun almarhum Kms. Hamid meninggal dunia harta tersebut dikuasai oleh istri almarhum Kms. Hamid yang keempat atas nama Khodijah dan anak-anaknya yaitu hasil perkawinan antara almarhum Kms. Hamid dengan Khodijah. Namun menurut istri almarhum Kms. Hamid yang ketiga yaitu Solha bahwa istri almarhum Kms. Hamid yang keempat tersebut yaitu Khodijah menguasai harta warisan di atas merupakan tanpa hak dan melawan secara hukum.

Bahwa istri almarhum Kms. Hamid, Solha beserta anak-anaknya dan anak-anak dari istri almarhum Kms. Hamid yang pertama dan kedua telah berulang kali mengajak istri almarhum Kms. Hamid yaitu Khodijah dan anak-anaknya untuk bermusyawarah agar dapat dibagikan harta tersebut kepada sesama ahli waris, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena istri almarhum Kms. Hamid yaitu Khodijah dan anak-anaknya bersikeras tetap dengan pendiriannya untuk tidak akan memberikannya.

Adapun yang menjadi alasan istri almarhum Kms. Hamid yaitu Khodijah dan anak-anaknya bersikeras tetap dengan pendiriannya untuk tidak akan memberikannya, bahwasanya menurut Khodijah yang menjadi objek perkara merupakan hak milik sah anak dari Khodijah sebagaimana telah dilakukan jual beli antara almarhum Kms. Hamid dengan anak dari istri almarhum yang keempat yaitu Khodijah semasa almarhum hidup.

Solha adalah istri ketiga almarhum Kms. Hamid yang sah, yang merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari almarhum Kms. Hamid. Melihat perbuatan istri almarhum Kms. Hamid yaitu Khodijah dan anak-anaknya bersikeras tetap dengan pendiriannya untuk tidak akan memberikan haknya dan ahli waris yang lain yang merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdata Solha bin Johar bersama dengan anak-anaknya dan anak-anak dari istri almarhum Kms. Hamid yang pertama dan kedua menganggap bahwa permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara sukarela.

Maka, ahli waris yang tidak mendapatkan haknya mengajukan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Palembang untuk dapat memutuskan perkara yang dihadapi, demi untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai ahli waris dari almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf.

Adapun yang menjadi para pihak terhadap perkara gugat waris itu sendiri ialah kedua istri almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf dan semua anak dari keempat istri almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf yang turut serta menjadi pihak penggugat dan tergugat dengan rincian yaitu sebagai pihak penggugat I ialah istri almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf ke 3 (tiga) atas nama Solha binti Johar sedangkan sebagai pihak tergugat I adalah istri almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf ke 4 (empat) atas nama Khodijah binti A. Hamid, 2 (dua) orang anak dari almarhum Murni sebagai penggugat 5 (lima) atas nama Kms. Heri bin Kms. Hamid dan penggugat 6 (enam) atas nama Nyimas Ira binti Kms. Hamid, 2 (dua) orang anak dari almarhum Lela sebagai Penggugat 7 (tujuh) atas nama Kms. Deni bin Kms. Hamid dan penggugat 8 (delapan) atas nama Nyimas Dina binti Kms. Hamid.

Selanjutnya 3 (tiga) orang anak dari penggugat I untuk turut serta sebagai penggugat yaitu penggugat ke 2 (dua) atas nama Nyimas Yuli Fitrianti binti Kms. Hamid, penggugat ke 3 (tiga) atas nama Nyimas Ana Kopen binti Kms. Hamid dan penggugat ke 4 (empat) atas nama Nyimas Husnul Hotimah binti Kms. Hamid serta 4 (empat) orang anak dari pihak tergugat I yaitu turut serta sebagai pihak tergugat ke 2 (dua) atas nama Kms Muharam Fisabilillah bin Kms. Hamid, tergugat ke 3 (tiga) atas nama Nyimas Ayu Wandira binti Kms. Hamid, tergugat ke 4 (empat) atas nama Kms Yunus bin Kms Hamid dan tergugat ke 5 (lima) atas nama Nyimas Saraswati binti Kms. Hamid, kesemuanya tersebut dalam keadaan hidup serta beragama Islam.

Dalam pemahaman para pihak baik sebagai pihak penggugat ataupun tergugat, penulis buat dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pihak Penggugat | | Pihak Tergugat | |
| Nama | Status Pihak | Nama | Status Pihak |
| 1 | Solha binti Johar | Ke-1 (satu) | Khodijah binti A. Hamid | Ke-1 (satu) |
| 2 | Nyimas Yuli Fitrianti binti Kms. Hamid | Ke-2 (dua) | Kms Muharam Fisabilillah bin Kms. Hamid | Ke-2 (dua) |
| 3 | Nyimas Ana Kopen binti Kms. Hamid | Ke-3 (tiga) | Nyimas Ayu Wandira binti Kms. Hamid | Ke-3 (tiga) |
| 4 | Nyimas Husnul Hotimah binti Kms. Hamid | Ke-4 (empat) | Kms. Yunus bin Kms. Hamid | Ke-4 (empat) |
| 5 | Kms. Heri bin Kms. Hamid | Ke-5 (lima) | Nyimas Saraswati binti Kms. Hamid | Ke-5 (lima) |
| 6 | Nyimas Ira binti Kms. Hamid | Ke-6 (enam) | - | - |
| 7 | Kms. Deni bin Kms. Hamid | Ke-7 (tujuh) | - | - |
| 8 | Nyimas Dina binti Kms. Hamid | Ke-8 (delapan) | - | - |

1. **Deskripsi Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg.[[11]](#footnote-12)**

Putusan dengan nomor perkara 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg merupakan perkara perdata tentang gugat waris antara istri dari almarhum H. Hamid bin Yusuf, dimana gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2012 oleh Solha. Nama lengkapnya ialah Solha binti Johar, Ia adalah salah satu istri sah almarhum Kemas H. Hamid Yusuf yang telah meninggal dunia pada tahun 2011. Solha binti Johar bersama kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang untuk mendaftarkan perkara gugatan waris demi mendapatkan hak-haknya yang menyangkut dengan harta peninggalan.

Surat gugatan telah dibuat oleh kuasa hukum dari penggugat pada tanggal 23 Juli 2012 yang berisi tuntutan, salah satunya untuk mendapatkan hak waris dari suaminya yaitu almarhum Kemas H. Hamid Yusuf. Solha binti Johar dan ketiga anaknya serta bersama-sama dengan keempat anak dari istri pertama dan kedua dari almarhum Kemas H. Hamid Yusuf untuk ikut serta sebagai pihak penggugat. Adapun yang menjadi pihak tergugat ialah istri almarhum Kemas H. Hamid Yusuf itu sendiri yang keempat yaitu atas nama Khodijah binti A. Hamid beserta keempat anak-anaknya.

Persidangan pertama telah terlaksana sesuai dengan jadwal persidangan dan dilanjutkan dengan jadwal selanjutnya yaitu perdamaian kedua belah pihak, namun hasil yang diharapkan majelis hakim tidaklah tercapai sehingga dilanjutkan dengan agenda selanjutnya. Pihak tergugat telah membuat jawaban gugatan dan telah dibacakan pada saat persidangan dengan melakukan eksepsi terhadap gugatan penggugat. Kedua belah pihak tidak putus asa dengan terus melakukan pembelaan yaitu reflik begitu juga pihak tergugat melakukan hal yang sama yaitu duplik serta kesimpulan kedua belah pihak.

Dalam menjalani persidangan di Pengadilan Agama Kelas A I Palembang, kedua belah pihak telah berusaha untuk memperjuangkan haknya masing-masing dengan berbagai cara seperti melampirkan fotocopy surat-surat ataupun menghadirkan para saksi dipersidangan. Namun, semua tuntutan dari pihak penggugat hanya sebagian dikabulkan dan eksepsi dari tergugat ditolak seluruh oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, dan pada akhirnya majelis hakim telah memutuskan bahwa kedua belah pihak baik sebagai penggugat ataupun tergugat dan 11 (sebelas) anak dari almarhum Kemas A. Hamid bin Yusuf diberikan bagian-bagian hak warisnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Adapun rincian pembagian hak waris yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan putusan nomor perkara 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg. pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pihak Penggugat | | Pihak Tergugat | |
| Nama | Hak Waris | Nama | Status Pihak |
| 1 | Solha binti Johar (istri ke tiga almarhum Kms. Hamid bin Kms. Yusuf/penggugat I) | 15/120 = 12,50% | Khodijah binti A. Hamid (istri ke empat almarhum Kms. Hamid bin Yusuf/tergugat I) | 15/120 = 12,50% |
| 2 | Nyimas Yuli Fitrianti binti Kms. Hamid (anak perempuan Solha/penggugat II) | 6/120 = 5% | Kms. Muharam Fisabilillah bin Kms. Hamid (anak laki-laki Khodijah/tergugat II) | 12/120= 10% |
| 3 | Nyimas Ana Kopen binti Kms. Hamid (anak perempuan Solha/penggugat III) | 6/120 = 5% | Nyimas Ayu Wandira binti Kms. Hamid (anak perempuan Khodijah/tergugat III) | 6/120 = 5% |
| 4 | Nyimas Husnul Hotimah binti Kms. Hamid (anak perempuan Solha/penggugat IV) | 6/120 = 5% | Kms. Yunus bin Kms. Hamid (anak laki-laki Khodijah/tergugat IV) | 12/120= 10% |
| 5 | Kms. Heri bin Kms. Hamid (anak laki-laki almarhumah Murni/penggugat V) | 12/120= 10% | Nyimas Saraswati binti Kms. Hamid (anak perempuan Khodijah/tergugat V) | 6/120 = 5% |
| 6 | Nyimas Ira binti Kms. Hamid (anak perempuan almarhumah Murni/penggugat VI) | 6/120 = 5% | - | - |
| 7 | Kms. Deni bin Kms. Hamid (anak laki-laki almarhumah Lela/penggugat VII) | 12/120= 10% | - | - |
| 8 | Nyimas Dina binti Kms. Hamid (anak perempuan almarhumah Lela/penggugat VIII) | 6/120 = 5% | - | - |

1. Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), halaman 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), halaman 36. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mer’an Zikri, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Kelas IA Palembang Tentang Perkara Nafkah Anak”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Sumber data sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Palembang yang dimulai dari zaman kesultanan Palembang sampai perkembangan sesudah PP nomor 45 tahun 1957, yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jakabaring. [↑](#footnote-ref-6)
6. Runtuhnya kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II di atas, penulis sempurnakan dengan melihat langsung artikel yang bersumber dari <http://wartasejarah.blogspot.co.id/2013/07/perjuangan-sultan-mahmud-badaruddin-ii.html>, diakses tanggal 6 Juni 2016 pukul 13:53. [↑](#footnote-ref-7)
7. Tugas masing-masing struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang (*Job Description*) di atas diambil langsung dari situs [http://www.pa-kraksaan.go.id/index.php/layout/tupoksi.html diakses tanggal 4 Juni 2016 pukul 12.31](http://pa-palembang.go.id/images/file/PDF/uraian-tugas-paplg-2014.pdf%20diakses%20tanggal%204%20Juni%202016%20pukul%2012.31). [↑](#footnote-ref-8)
8. Sumber data mengenai visi dan misi Pengadilan Agama Palembang, yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jakabaring. [↑](#footnote-ref-9)
9. Perkara dan jumlah dari tahun 2012-2015 di atas diambil langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jakabaring. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sumber data yang tercantum dalam deskripsi kasus nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg. yang terdapat dalam duduk perkara putusan dengan nomor di atas dikutip langsung dari isi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. [↑](#footnote-ref-11)
11. Sumber data yang tercantum dalam deskripsi putusan nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg. di atas dikutip langsung dari isi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. [↑](#footnote-ref-12)